

***A REVIEW OF DIY'S DECENTRALIZATION OF THE URBAN SPRAWL
PHENOMENON IN THE YOGYAKARTA METROPOLITAN AREA
(KARTAMANTUL)***

**TINJAUAN DESENTRALISASI DIY TERHADAP FENOMENA URBAN
SPRAWL DI KAWASAN METROPOLITAN YOGYAKARTA
(KARTAMANTUL)**

Vivian Alvianti^{1*}, Fathurrahman², Iqsal Aryo Syahputra³

^{1,2,3} Institut Teknologi Bandung, Indonesia

E-mail: vivianalvianti1@gmail.com

Abstract: Decentralization in Indonesia has led to a shift in responsibilities from the central government to the regions. This has been observed in the distribution of jobs and population across metropolitan areas, such as in the Yogyakarta Metropolitan Area (Kartamantul). Kartamantul is a secondary metropolitan area in Indonesia where local governments have taken the initiative to jointly form a Joint Secretariat. The development of Kartamantul has expanded into the peripheral areas, as evidenced by changes in land use. This article examines the impact of decentralization by the Government of the Special Region of Yogyakarta on the phenomenon of urban sprawl in the Kartamantul Region. The analytical method used is descriptive analysis, with secondary data collection from previous research on decentralization and urban sprawl in Yogyakarta. The results of the analysis identify the characteristics of urban sprawl in Kartamantul based on three aspects: land use change, population growth, and economic growth. By 2017, there had been changes in non-built-up land use in the peri-urban areas of Yogyakarta, accompanied by population growth and economic expansion. The Joint Secretariat of Kartamantul has come up with solutions to address the urban sprawl phenomenon, such as the addition of Trans-Jogja routes reaching Bantul and Sleman regencies, as well as collaborative management of the Piyungan Landfill and Sewon WWTP. The conclusion of this research is that cooperation among regional governments through the Joint Secretariat of Kartamantul is an effective grassroots initiative. However, there is a need for the Joint Secretariat to be involved in spatial planning due to the complex development challenges in Kartamantul.

Keywords: Decentralization, Urban Sprawl, Kartamantul

Abstrak: Desentralisasi di Indonesia menyebabkan pergeseran tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah. Teridentifikasi pada penyebaran pekerjaan dan populasi di seluruh wilayah metropolitan, seperti di Kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul). Kartamantul, merupakan kawasan metropolitan sekunder di Indonesia, dimana pemerintah daerah mengambil inisiatif lokal untuk bersama-sama membentuk sekretariat bersama. Perkembangan kartamantul telah meluas kewilayah pinggiran, yang dapat digambarkan dengan perubahan guna lahannya. Artikel ini meninjau pengaruh desentralisasi Pemerintah D.I. Yogyakarta terhadap fenomena *urban sprawl* di kawasan kartamantul. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengumpulan data sekunder dari penelitian sebelumnya tentang desentralisasi dan *urban sprawl* di yogyakarta. Hasil analisis mengidentifikasi karakteristik *urban sprawl* di kartamantul didasarkan oleh tiga aspek yaitu perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Hingga tahun 2017, terjadi perubahan guna lahan

non terbangun dikawasan *peri-urban* yogyakarta dan diikuti perkembangan jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi. Sekretariat bersama kartamantul memiliki solusi dari fenomena *urban sprawl* seperti penambahan rute Trans-Jogja yang menjangkau Kabupaten Bantul dan Sleman, serta kerjasama pengelolaan TPA Piyungan dan IPAL Sewon. Kesimpulan penelitian ini adalah kerjasama antar pemerintah daerah melalui sekretariat bersama kartamantul merupakan salah satu inisiatif efektif yang berasal dari bawah. Namun perlu keterlibatan sekretariat bersama dalam perencanaan tata ruang, karena tantangan pembangunan daerah di karmantul yang kompleks.

Kata Kunci: Desentralisasi, *Urban Sprawl*, Kartamantul

Copyright (c) 2024 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kota adalah mesin pembangunan nasional, mereka memberikan skala ekonomi dan aglomerasi, dan memungkinkan banyak barang dan jasa diproduksi dan diperdagangkan secara lebih efisien. Kota-kota menyumbang bagian besar dari *output* nasional banyak negara Asia. Pada tahun 2010, kawasan perkotaan menyumbang 80% Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan Asia-Pasifik. Migrasi ke kota telah meningkatkan produktivitas bersih ekonomi dengan mengarahkan tenaga kerja ke lokasi di mana kontribusi ekonomi yang lebih besar dimungkinkan. Banyak negara di Asia Tenggara yang berkembang pesat mengalami peningkatan laju migrasi internal karena meningkatnya peluang ekonomi di daerah perkotaan (Unhabitat, 2010). Hal ini menyebabkan terjadinya fenomena *urban sprawl* hampir di seluruh kota besar seluruh dunia. *Urban sprawl* didefinisikan sebagai pertumbuhan kota di sepanjang pinggirannya. Meskipun definisi yang jelas dapat diperdebatkan, *urban sprawl* diterima secara luas sebagai pertumbuhan yang tidak direncanakan dan tidak merata yang didorong oleh banyak proses yang menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien (Bhatta et al., 2010).

Fenomena transformasi yang terjadi pada kawasan perkotaan bukanlah sesuatu yang baru, melainkan suatu proses yang berlangsung secara perlahan. Saat ini, dunia berada dalam era posmodern yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Dalam kawasan metropolitan, ini menciptakan perubahan signifikan dalam lanskap perkotaan melalui perubahan spasial, yang pada gilirannya menghasilkan perubahan mendasar dalam struktur perkotaan. Di zaman perkotaan modern, dorongan untuk pertumbuhan dan perubahan telah bergeser dari pusat kota

ke wilayah sekitarnya (Erie Sadewo et al., 2018). Aksesibilitas yang baik dari pusat kota ke pinggiran kota juga mendorong kawasan pemukiman berkembang di pinggiran kota (Rachmawati et al., 2015). Kota yang terus berkembang dibentuk oleh teknologi transportasi. Dimana moda transportasi mobil telah mengubah bentuk kota secara radikal karena hampir seluruhnya menghilangkan aktivitas berjalan kaki (Glaeser & Kahn, 2003).

Indonesia sendiri merupakan negara tempat gagasan wilayah metropolitan yang diperluas menggabungkan apa yang secara konvensional dipisahkan sebagai fungsi pedesaan dan perkotaan untuk pertama kali diidentifikasi (D, Hudalah, 2003). Konsep *sprawl* yang diperluas di Indonesia dari konsep umumnya yaitu terdapat dua konsep yang menyatu dalam konsepsi populer *sprawl*: desentralisasi dan densitas. Desentralisasi mengacu pada penyebaran pekerjaan dan populasi di seluruh wilayah metropolitan (Glaeser & Kahn, 2003). Dengan adanya reformasi politik dan proses desentralisasi yang sedang berlangsung, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi yang padat di dunia saat ini. Dimana konsep desentralisasi di Indonesia reformasi kebijakan desentralisasi Indonesia melibatkan pergeseran besar beberapa fungsi, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat ke daerah (Firman, 2010).

Pemukiman yang dengan berbagai cara disebut '*ex-urbs*' (Soja, 2000), 'kota tepi' (Garreau, 1991), '*technoburbs*' (Fishman, 1987) dan 'kota tanpa tepi' (Lang, 2003) dianggap sebagai sinyal munculnya sesuatu yang berbeda. Beberapa istilah tersebut dapat menginterpretasikan kawasan yang kota yang melebar keluar atau pinggiran kota (Phelps & Wood, 2011). Definisi *urban sprawl*, meskipun kontroversial, adalah pola pertumbuhan yang ditandai oleh pengembangan yang tidak terencana dan tidak merata di wilayah perkotaan. Ini disebabkan oleh berbagai faktor dan seringkali mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien (Bhatta et al., 2010). Implikasi langsung dari *sprawl* adalah perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di suatu wilayah karena *sprawl* menginduksi peningkatan area terbangun dan beraspal.

Desentralisasi kini dapat dilihat sebagai alat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Desentralisasi fiskal dipandang sebagai peningkatan terhadap efisiensi ekonomi: penyediaan *output* lokal yang dibedakan menurut

kebutuhan dan keadaan lokal yang akan menghasilkan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih tinggi daripada yang ditentukan secara terpusat dan lebih seragam di semua tingkatan yurisdiksi (Stansel, 2005). Dari sudut pandang pembangunan kota dan daerah, desentralisasi merupakan prasyarat untuk penyediaan pelayanan publik dan infrastruktur yang efektif dan efisien, karena sampai saat ini tugas tersebut sebagian besarnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang belum tentu memenuhi kebutuhan yang di butuhkan oleh daerah, dan seringkali tidak terorganisir dengan baik (Firman, 2010).

Dalam artikel ini, akan dibahas Kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul), yang merupakan salah satu kawasan metropolitan sekunder di Indonesia. Di kartamantul, pemerintah daerah di wilayah tersebut mengambil inisiatif lokal untuk bersama-sama membentuk Sekretariat Bersama Pembangunan Infrastruktur Kartamantul pada tahun 2001. Tugas utama dari sekretariat ini adalah mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan infrastruktur lintas batas di seluruh wilayah Kartamantul (Firman, 2010). Ada tiga pemerintah daerah di wilayah metropolitan Kartamantul: satu kota, yaitu Kota Yogyakarta, dan dua kabupaten (Kabupaten), yaitu Sleman dan Bantul. Ketiga pemerintah daerah ini berada di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY Yogyakarta). Total populasi wilayah tersebut sekitar 2,7 juta pada tahun 2022, dimana sekitar 1 juta adalah penduduk perkotaan. Aglomerasi perkotaan di kawasan metropolitan ini meliputi area seluas 234 km², termasuk 33 km² di Kota Yogyakarta; 93 km² dan 108 km² masing-masing di Kabupaten Bantul dan Sleman.



Gambar 1. Peta Aglomerasi Kartamantul
Sumber: (Hudalah et al., 2013)

Kota Yogyakarta, yang merupakan pusat dari wilayah Kartamantul, telah mengalami perkembangan yang melibatkan perluasan ke daerah sekitarnya. Proses ini mencakup 5 kecamatan yang berada pada Kabupaten Sleman dan 3 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bantul. Kartamantul, yang juga dikenal sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dalamnya mencakup wilayah Kota Yogyakarta serta sebagian dari kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman serta sebagian dari wilayah yang terdapat di Kabupaten Bantul (Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi DIY No. 2 Tahun 2010). Pembentukan terhadap Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) adalah salah satu upaya untuk melakukan kegiatan pengendalian terhadap perluasan perkotaan agar tidak terjadi penambahan wilayah yang dapat merembet atau menyinggung ke wilayah yang terdapat sekitarnya. Namun, pada pengembangan KPY tanpa disadari telah terjadinya perluasan kegiatan hingga ke wilayah pinggiran. Ekspansi KPY ini tercermin dalam perubahan fisik penggunaan lahan, yang dikenal sebagai urbanisasi spasial (Magvirah Andira Selang et al., 2018).

Pertanian masih menjadi kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah Kartamantul, khususnya di Kabupaten Bantul dan Sleman. Namun demikian, beberapa kegiatan ekonomi perkotaan juga berkembang pesat, antara lain pendidikan tinggi, perdagangan, pariwisata, seni dan industri kerajinan, terutama di Kota Yogyakarta. Saat ini, Kartamantul menjadi tujuan wisata domestik dan mancanegara terbesar kedua di Indonesia setelah pulau Bali. Sekitar 90 perguruan tinggi dari berbagai tingkatan berada di kawasan ini, termasuk Universitas Gajah Mada, yang tertua dan salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia. Faktanya, wilayah ini merupakan salah satu konsentrasi kegiatan pendidikan tinggi terbesar di Indonesia (Firman, 2010).

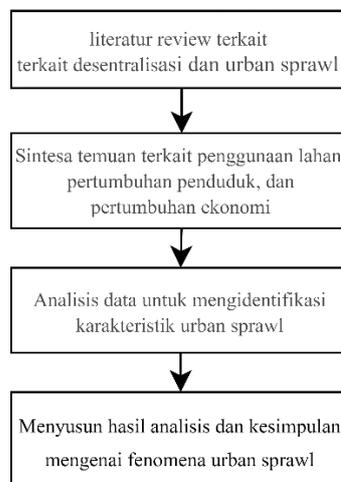
Pembangunan perkotaan di Indonesia akhir-akhir ini ditandai dengan tingginya laju konversi lahan, terutama di daerah pinggiran. Menurut data Bank Dunia (2000), tidak kurang dari sepuluh persen lahan pertanian di Jawa telah dikonversi menjadi perkotaan (Pradoto, 2012). Hal ini juga terjadi di Kawasan Kartamantul, yang terlihat dalam data yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Jumlah rata-rata pertumbuhan terhadap penduduk di kawasan *urban* dan *peri-urban* Yogyakarta telah meningkat sebesar 5,06%. Situasi ini meningkatkan permintaan

akan area perumahan sebagai tempat tinggal, baik di kawasan pusat kota maupun kawasan yang berada di daerah pinggiran kota (Devi et al., 2020). Oleh karena itu, didalam artikel ini akan dilakukan peninjauan tentang pengaruh desentralisasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fenomena *urban sprawl* di kawasan Kartamantul melalui data penelitian sebelumnya yang membahas mengenai desentralisasi dan *urban sprawl* di Yogyakarta.

METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yang telah membahas desentralisasi dan *urban sprawl* di Yogyakarta. Data sekunder ini mungkin mencakup informasi yang relevan mengenai perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Metropolitan Yogyakarta. Data ini dapat berupa statistik, angka-angka, tabel, grafik, dan deskripsi yang ada dalam penelitian sebelumnya. Analisis data dilakukan melalui metode analisis deskriptif. Dalam analisis ini, penelitian mungkin akan menggunakan statistik, grafik, dan deskripsi untuk menjelaskan fenomena *urban sprawl* di kawasan Metropolitan Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis diidentifikasi karakteristik *urban sprawl* di kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul) berdasarkan tiga aspek yaitu perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Hingga tahun 2017 diketahui telah terjadi perubahan guna lahan non terbangun menjadi guna lahan terbangun di kawasan peri-*urban* Yogyakarta dan diikuti perkembangan jumlah penduduk serta pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2. Teknik Analisis Data

. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi:

- a. Identifikasi dan pengumpulan data sekunder yang relevan yang membahas desentralisasi dan *urban sprawl* di Yogyakarta.
- b. Analisis data sekunder untuk mengidentifikasi karakteristik *urban sprawl* di Kawasan Metropolitan Yogyakarta berdasarkan aspek-aspek (perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi).
- c. Penyusunan laporan penelitian yang menjelaskan temuan dan kesimpulan mengenai *urban sprawl* di kawasan tersebut dengan merinci perubahan guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Karakteristik *Urban Sprawl* di Kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul)

Urban sprawl juga merambah ataupun meluas ke kota Yogyakarta, yang merupakan pusat perkotaan utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi pusat seni dan budaya Jawa, kota ini juga mengalami pertumbuhan perkotaan yang pesat. Proses pertumbuhan perkotaan di kota Yogyakarta dipengaruhi dari adanya beberapa aspek transformasi yang signifikan dalam struktur administrasi dan pembangunan infrastruktur. Sementara ekspansi yang terjadi di kawasan luar kota Yogyakarta sangat menonjol, kota ini juga telah memperluas kawasan padat bangunannya di sepanjang pinggirannya (Divigalpitiya & Nurul Handayani, 2015). Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan penduduk di kawasan *urban* dan *peri-urban* Yogyakarta rata-rata meningkat sebesar 5,06%. Situasi ini meningkatkan permintaan akan lahan pemukiman sebagai lokasi tinggal, baik di kawasan pusat kota maupun di kawasan yang terdapat di wilayah pinggiran kota. Peningkatan populasi berkorelasi positif dengan penggunaan terhadap lahan, membuat perubahan penggunaan terhadap lahan terus menerus terjadi (Devi et al., 2020). Konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun menjadi bukti yang kuat bahwa di dalam proses transformasi semakin jelas bahwa *urban sprawl* telah terjadi dalam satu decade terakhir. Karakteristik *urban sprawl* yang terjadi di Kartamantul dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek antara lain adalah aspek perubahan terhadap guna

lahan, pertumbuhan penduduk, dan laju pertumbuhan ekonomi yang akan dijabarkan dibawah ini:

1. Perubahan Guna Lahan

Dalam artikel ini, kami menggunakan daerah Kartamantul yang mencakup Yogyakarta, sebagian Kabupaten Bantul (Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon), dan Kabupaten Sleman (Kecamatan Depok, Ngemplak, Mlati, Ngaglik, Gamping, dan Godean). Dimana selanjutnya diidentifikasi perubahan terhadap guna lahan yang terjadi untuk Kawasan terbangun dan Kawasan yang tidak terbangun. Dilansir dari Devi et al., (2020) berikut merupakan Perubahan luas lahan pertanian di kawasan *peri urban* Kartamantul:

Tabel 1. Perubahan Luas Lahan Non Terbangun di *Peri Urban* Kartamantul

Desa	Luas Lahan Pertanian (Ha)		Perubahan Luas Lahan	Presentase Perubahan Lahan	
	2007	2017		2007	2017
Banyuraden	143	82	-61	35,75	20,5
Ambarketawang	264	257	-7	42,04	40,92
Trihango	150	113	-37	26,69	20,11
Nogotirto	100	52	-48	28,65	14,9
Sidoarum	249	84	-165	66,76	22,52
Sidomoyo	129	105	-24	42,72	34,77
Sinduadi	85	78	-7	11,53	10,58
Sendangadi	194	168	-26	36,19	31,34
Minomartani	58	20	-38	37,91	13,07
Sinduharjo	259	132	-127	42,53	21,67
Sariharjo	156	137	-19	22,64	19,88
Catur Tunggal	100	69	-31	9,06	6,25
Condong Catur	132	97	-35	13,89	10,21
Maguwoharjo	487	419	-68	32,45	27,91
Wedomartani	746	565	-181	59,97	45,42
Jagalan	2	1	-1	7,41	3,7
Banguntapan	132	118	-14	15,85	14,17
Singoseran	26	16	-10	38,81	23,88
Baturetno	86	78	-8	21,83	19,8
Wirokerten	155	143	-12	40,16	37,05
Tamanan	153	95	-58	40,8	25,33
Potorono	129	127	-2	33,08	32,56
Ranggungharjo	135	78	-57	24,06	13,9
Bangunharjo	173	146	-27	25,48	21,5
Ngestiharjo	97	60	-37	19,02	11,76
Tamantirto	288	183	-105	42,86	27,23

Desa	Luas Lahan Pertanian (Ha)		Perubahan Luas Lahan	Presentase Perubahan Lahan	
	187	101		36,45	19,69
Tirtonirmolo	187	101	-86	36,45	19,69
Total	4815	3524	-1291	854,59	590,62

Sumber: (Devi et al., 2020)

Selanjutnya, berikut adalah perubahan penggunaan lahan yang telah dibangun di Yogyakarta, sebagian dari wilayah yang terdapat di Kabupaten Bantul (Kec. Kasihan, Kec. Sewon, dan Kec. Banguntapan), serta yang berada pada wilayah di Kabupaten Sleman (Kec. Depok, Kec. Ngemplak, Kec. Ngaglik, Kec. Mlati, Kec. Godean, dan Kec. Gamping):

Tabel 2. Perubahan Luas Lahan Terbangun di *Peri Urban* Kartamantul

Desa	Luas Lahan Pertanian (Ha)		Perubahan Luas Lahan	Presentase Perubahan Lahan	
	2007	2017		2007	2017
	Banyuraden	263		324	61
Ambarketawang	423	430	7	67,36	68,47
Trihango	421	457	36	74,91	81,32
Nogotirto	234	281	47	67,05	80,52
Sidoarum	265	286	21	71,05	76,68
Sidomoyo	105	164	59	34,77	54,3
Sinduadi	625	680	55	84,8	92,27
Sendangadi	372	399	27	69,4	74,44
Minomartani	97	135	38	63,4	88,24
Sinduharjo	332	458	126	54,52	75,21
Sariharjo	456	474	18	66,18	68,8
Catur Tunggal	997	1089	92	90,31	98,64
Condong Catur	748	783	35	78,74	82,42
Maguwoharjo	1114	1185	71	74,22	78,95
Wedomartani	551	732	181	44,29	58,84
Jagalan	28	29	1	103,7	107,41
Banguntapan	647	662	15	77,67	79,47
Singoseran	46	57	11	68,66	85,07
Baturetno	300	308	8	76,14	78,17
Wirokerten	278	290	12	72,02	75,13
Tamanan	230	288	58	61,33	76,8
Potorono	261	263	2	66,92	67,44
Ranggungharjo	429	486	57	76,47	86,63
Bangunharjo	536	563	27	78,94	82,92
Ngestiharjo	378	415	37	74,12	81,37
Tamantirto	357	461	104	53,13	68,6
Tirtonirmolo	375	461	86	73,1	89,86
Jumlah	10868	12160	1292	1889	2139

Sumber: (Devi et al., 2020)

2. Pertumbuhan Penduduk

Sejalan dengan yang telah dipaparkan di latar belakang penelitian bahwa selama satu dekade terakhir, terjadi peningkatan rata-rata terhadap pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan dan juga *peri-urban* Yogyakarta sebesar 5,06%. Fenomena ini tentunya menghasilkan kebutuhan yang semakin besar akan lahan pemukiman yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, baik di kawasan pusat kota maupun di kawasan pinggiran kota. Jumlah penduduk yang terdapat di wilayah tersebut akan terus meningkat akibat adanya pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan migrasi masuk. Pertambahan penduduk yang signifikan terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan luas lahan kosong atau lahan *non-terbangun* di kawasan *peri-urban* di kota Yogyakarta. Lahan terbuka tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan infrastruktur lainnya sebagai tempat aktivitas bagi para penduduk.

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk *Peri Urban* Kartamantul Selama 10 Tahun

Desa	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan	Kepadatan	
	2007	2017	(%)	2007	2017
Banyuraden	12692	20349	6,03%	3173	5087
Ambarketawang	18781	24389	2,99%	2991	3884
Trihango	12734	20514	6,11%	2266	3650
Nogotirto	14650	20334	3,88%	4198	5826
Sidoarum	12724	19456	5,29%	3411	5216
Sidomoyo	7536	8178	0,85%	2495	2708
Sinduadi	31792	34435	0,83%	4314	4672
Sendangadi	12075	17624	4,60%	2253	3288
Minomartani	13615	17515	2,86%	8899	11448
Sinduharjo	13808	21899	5,86%	2267	3596
Sariharjo	15144	28834	9,04%	2198	4185
Catur Tunggal	60045	81473	3,57%	5439	7380
Condong Catur	34574	67044	9,39%	2303	4467
Maguwoharjo	26686	42433	5,90%	2809	4467
Wedomartani	20796	30666	4,75%	1672	2465
Jagalan	3449	3790	0,99%	12774	14037
Banguntapan	32771	56270	7,17%	3934	6755
Singosoran	3189	5040	5,80%	4760	7522
Baturetno	11969	19220	6,06%	3038	4878
Wirokerten	10917	15320	4,03%	2828	3969

Desa	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan	Kepadatan	
	2007	2017	(%)	2007	2017
Tamanan	8590	15030	7,50%	2291	4008
Potorono	10092	14280	4,15%	2588	3662
Ranggunharjo	25505	35660	3,98%	4546	6357
Bangunharjo	18723	31140	6,63%	2757	4586
Ngestiharjo	26265	40720	5,50%	5150	7984
Tamantirto	15421	28950	8,77%	2295	4308
Tirtonirmolo	19107	26850	4,05%	3725	5234

Sumber: (Devi et al., 2020)

3. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting yang dapat dijadikan untuk pengukuran keberhasilan terhadap suatu pembangunan ekonomi yang berada pada suatu wilayah yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan hasil yang nyata yang di hasilkan dari kebijakan pembangunan yang telah diterapkan, terutama dalam konteks ekonomi. Indikator sederhana yang digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat nilai PDRB yang ada di daerah. Berikut merupakan tabel PDRB berdasarkan harga konstan dan harga berlaku di Kawasan Kartamantul.

Tabel 4. PDRB Kartamantul Tahun 2017

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
	2017	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11932976.30	7930314.50
B. Pertambangan dan Penggalian	615943.00	489349.20
C. Industri Pengolahan	15635872.10	11878962.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	173689.00	151680.90
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	121272.20	90288.80
F. Konstruksi	11310871.10	8828648.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10220359.50	7787541.30
H. Transportasi dan Pergudangan	6783602.20	4976405.70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12304098.90	8788711.30
J. Informasi dan Komunikasi	9785905.10	10222383.30
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4642314.70	3303797.60
L. Real Estat	8368916.80	6708239.40
M,N. Jasa Perusahaan	1209401.70	1086911.80

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahunan (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
	2017	2017
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10213350.40	6956541.30
P. Jasa Pendidikan	9697395.20	8096345.90
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3003721.30	2445240.60
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3109029.30	2558881.60
Produk Domestik Regional Bruto	119128718.80	92300243.90

Sumber: Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB kota Yogyakarta adalah sektor Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal tersebut mengindikasikan ketiga sektor utama tersebut adalah sektor yang menyokong perekonomian di Kawasan Kartamantul khususnya kota Yogyakarta.

Desentralisasi DIY terhadap Fenomena *Urban Sprawl* di Kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul)

Kerjasama Kartamantul memiliki tujuan diantaranya adalah untuk mencapai keseimbangan dan harmonisasi dalam pengelolaan dan pengembangan terhadap infrastruktur di wilayah perkotaan dan juga di wilayah perdesaan. Koordinasi antara 3 (tiga) kota dan kabupaten tersebut meliputi beberapa tahap yang di dalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga evaluasi terhadap pengelolaan infrastruktur di daerah aglomerasi perkotaan di kawasan Kartamantul. Desentralisasi yang dilakukan melalui Sekretariat Bersama Kartamantul senantiasa bertujuan untuk menjembatani terwujudnya kerjasama yang memiliki nilai kesetaraan, adanya keadilan, bertambahnya tingkat partisipatif, adanya transparansi, dan mengedepankan kegiatan yang demokratis antara ketiga kota dan juga kabupaten yang terlibat. Tujuan dari adanya hal tersebut adalah untuk menciptakan perkotaan yang nyaman, indah, dan sehat, yang didukung oleh sarana-prasarana dan pelayanan yang memadai, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam wilayah ini. Melalui tinjauan 3 (tiga) aspek transformasi *peri urban* Kartamantul yang mengindikasikan terjadinya *urban sprawl* dapat dilakukan tinjauan terhadap beberapa elemen yang dapat menjadi pertimbangan

guna mengurangi sekaligus menjadi solusi dari adanya fenomena *urban sprawl* yang terjadi:

1. Transportasi

Penggunaan dan kepemilikan sepeda motor di Asia mencapai 80% di jalanan menurut ITF (2008) dimana hal tersebut mempengaruhi bentuk perkotaan yang mana turut terjadi di kawasan perkotaan Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian Sotya et. al., (2020) penduduk yang padat secara statistik hubungan yang positif dengan kemungkinan penggunaan terhadap sepeda motor, sementara secara statistik juga memiliki hubungan yang negatif dengan kemungkinan bersepeda dalam perjalanan. Menerapkan aksesibilitas yang mudah dan tarif yang terjangkau dalam sistem angkutan umum adalah faktor penting dalam upaya mengurangi dampak *urban sprawl* di Kartamantul. Yogyakarta Raya mendirikan sistem bus baru, Trans-Jogja, menyusul berlakunya Keputusan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 yang mengatur jaringan bus Trans-Jogja yang terdiri dari tiga koridor melingkar. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bentuk kota yang padat, termasuk kepadatan penduduk yang tinggi dan jarak perjalanan yang pendek, dapat membantu mengurangi (pertumbuhan) penggunaan sepeda motor di kawasan Metropolitan Yogyakarta melalui penggunaan angkutan umum.

Meninjau efek *urban sprawl* yang muncul di dua kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, dapat menjadi pertimbangan untuk menambah rute Trans-Jogja yang menjangkau sebagian wilayah yang terdapat di Kab. Bantul (Kec. Kasihan, Kec. Sewon, dan Kec. Banguntapan), dan wilayah yang terdapat di Kab. Sleman (Kec. Depok, Kec. Ngemplak, Kec. Ngaglik, Kec. Mlati, Kec. Godean, dan Kec. Gamping) sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Yogyakarta (KMY). Desentralisasi melalui Sekretariat Bersama Kartamantul dapat menjembatani perluasan rute Trans-Jogja yang tidak hanya berada di kota Yogyakarta tetapi mencakup Kabupaten Bantul dan Sleman.

2. Infrastruktur

Sejalan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, infrastruktur dasar termasuk listrik untuk industri, telekomunikasi untuk mendukung perdagangan, dan jalan raya, kereta api, dan pelabuhan untuk mengangkut barang telah lama dikenal sebagai elemen kunci dari lingkungan pendukung pertumbuhan ekonomi (Estache, A., 2004). Hal ini dapat berkontribusi secara langsung dengan menyediakan dan mendukung

penyampaian infrastruktur dasar, seperti layanan yang memiliki upaya dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap air minum yang dapat dikatakan aman dan memiliki ketersediaan terhadap sanitasi dasar. Hal yang sama diterapkan di Kawasan Metropolitan Yogyakarta pada beberapa infrastruktur dasar antara lain adalah:

A. Pengelolaan TPA Piyungan

Pada tahun 2013 yang terdapat didalam profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Yogyakarta tercatat ataupun terdata bahwa terdapat sebagian besar sampah yang dilakukan pengangkutan ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berasal dari wilayah Kota Yogyakarta, dengan persentase sebesar 34,89% (Mulasari et al., 2016). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keterlibatan aktif didalam pengelolaan terhadap sampah yang terdapat di kota Yogyakarta dengan memanfaatkan ketersediaan satuan kerja yang dikenal sebagai Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Sekber Kartamantul). Ketersediaan Sekretaris Bersama Kartamantul memiliki tanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan persampahan yang berada pada wilayah di tingkat provinsi dan dapat melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang terdapat di wilayah kabupaten/kota terkait. Sumber daya manusia dalam studi kasus ini juga turut terlibat yaitu sumber daya manusia harus memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat (Suwardana Malik et al., 2023). Pada tahap proses pengawasan yang akan dilakukan mencakup beberapa tahapan, seperti penarikan ataupun pengumpulan terhadap retribusi, pengumpulan atau pengangkutan sampah dari beberapa lokasi untuk selanjutnya akan di angkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Setelah itu, sampah yang berada pada Tempat Pembuangan Sementara dilakukan pengangkutan menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Piyungan menggunakan beberapa kendaraan pengangkut sampah seperti truk atau kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan terhadap sampah lainnya yang beroperasi pada tiga wilayah diantaranya, yaitu kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Selain itu, Sekber Kartamantul juga bertanggung jawab atas pengoperasian TPA sampah di Piyungan. Ini adalah langkah-langkah

penting dalam upaya pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Hingga masa saat ini, masih terus dilaksanakan program KDN (Kompensasi Dampak Negatif) yang menjadi salah satu komitmen bersama yang di bentuk antara Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul untuk memberikan dan mendistribusikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada masyarakat setempat yang terkena dampak dari adanya kegiatan yang berlangsung di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA), dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) yang dilakukan pada tahun 2021 di berbagai wilayah yang ada di kabupaten maupun kota telah berhasil dilaksanakan dan dapat dikatakan sukses (Sekber Kartamantul, 2023).

B. Pengelolaan IPAL Sewon

Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Sewon menjadi salah satu dari berbagai macam aspek infrastruktur regional dalam melakukan kegiatan pengelolaan terhadap sistem air limbah domestik yang dilakukan secara terpusat. Hal ini menjadi salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki potensi untuk memberikan dampak ataupun pengaruh terhadap lingkungan. Pemerintah Provinsi DIY, memiliki rencana di dalam melakukan peningkatan pelayanan terhadap sambungan ke rumah yang pada sebelumnya hanya sebanyak 25.000 pada tahun 2020 dan menjadi 50.000 pada tahun 2040, dengan melalui Unit Pelaksana Teknis IPAL Sewon. Selain itu, peningkatan kapasitas pengolahan IPAL Sewon juga akan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mendukung peningkatan jumlah sambungan rumah tersebut. Jaringan-jaringan pipa yang di peruntukkan untuk air limbah yang terlayani oleh IPAL Sewon mencakup wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, serta sebagian wilayah Kabupaten Bantul (Priambodo & Herumurti, 2020). Sekretariat Bersama Kartamantul sebagaimana halnya dalam pengelolaan TPA Piyungan juga turut berkoordinasi dengan UPT guna mengatasi dampak lingkungan yang timbul ataupun muncul. Seperti yang dikutip dalam Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP tahun 2017 dari Kementerian PUPR, salah satu

pilihan yang dapat menjadi pertimbangan untuk diambil didalam pengelolaan infrastruktur regional di bidang Pengelolaan Lingkungan Perkotaan (PLP) adalah memberikan kompensasi (Sekber Kartamantul, 2023). Pengelolaan IPAL Sewon yang usianya lebih muda dibandingkan TPA Piyungan diharapkan mampu mencegah kekeliruan pengelolaan bersama yang dilakukan melalui Sekretariat Kartmantul. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas Sekretariat Bersama termasuk kapasitas manajerial dan teknisnya yang bekerja sama dengan UPT Pengelolaan IPAL Sewon.

SIMPULAN

Praktik kerjasama antar pemerintah daerah melalui Sekretariat Bersama Kartamantul merupakan salah satu inisiatif paling efektif yang berasal dari bawah (*bottom up*). Koordinasi dan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Yogyakarta menjadi lebih efektif karena pelaksanaannya secara terpadu lintas wilayah administrasi pemerintahan yang berada di daerah, sehingga pengelolaannya menjadi tidak terpecah-pecah oleh masing-masing daerah. Lembaga multi pemerintah daerah yang digagas daerah ini dinilai efektif dalam menangani pengelolaan infrastruktur perkotaan lintas yurisdiksi di kawasan Kartamantul.

Berdasarkan tinjauan desentralisasi tersebut dapat menjadi solusi dalam mengurangi dampak yang muncul dari *urban sparwl* yang terjadi pada wilayah yang berada di Kawasan Metropolitan Yogyakarta. Ditinjau dari perkembangan jumlah penduduk yang terjadi di kawasan tersebut dan adanya peningkatan terhadap kawasan terbangun serta laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kawasan Metropolitan Yogyakarta ini, maka Sekretariat Bersama Kartamantul dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman untuk melibatkan diri dalam perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, serta mengimplementasikan kebijakan pengendalian pertumbuhan perkotaan yang efektif. Sehingga kerjasama yang dilakukan tidak terbatas pada koordinasi perencanaan infrastruktur, karena tantangan pembangunan daerah di Kawasan Metropolitan Yogyakarta jauh lebih besar dan lebih kompleks terhadap pembahasan serta penyelesaiannya daripada masalah infrastruktur.

SARAN

Pada ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat di tarik kesimpulannya dari pembahasan mengenai Tinjauan Desentralisasi DIY terhadap Fenomena *Urban Sprawl* di Kawasan Metropolitan Yogyakarta (Kartamantul) antara lain adalah:

1. Meskipun pendekatan *bottom-up* seperti praktik Sekretariat Bersama Kartamantul sangat efektif dalam menjalin kerjasama multi pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan daerah, hal yang harus diperhatikan adalah komunikasi antar daerah untuk mencegah terjadinya *conflict of interest* antar daerah yang terlibat.
2. Kerjasama antar pemerintah tidak hanya terbatas pada sektor infrastruktur, namun intervensi terhadap faktor penyebab *urban sprawl* seperti tutupan lahan dan perkembangan ekonomi juga dapat menjadi pertimbangan bagi Sekretariat Bersama Kartamantul guna mengurangi dampak negatif yang muncul dari terjadinya *urban sprawl* di daerah *peri urban* Yogyakarta.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagan, H., & Yamagata, Y. (2012). Landsat analysis of urban growth: How Tokyo became the world's largest megacity during the last 40years. *Remote Sensing of Environment*, 127, 210–222. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.09.011>
- Bhatta, B., Saraswati, S., & Bandyopadhyay, D. (2010). Urban sprawl measurement from remote sensing data. *Applied Geography*, 30(4), 731–740. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.02.002>
- Devi, M. K., Gorman, Y. H., & Hidayati, S. R. (2020). Spatial transformation in urban periphery: The case of Yogyakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 592(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/592/1/012022>
- Divigalpitiya, P., & Nurul Handayani, K. (2015). Measuring the urban expansion process of Yogyakarta City in Indonesia: Urban expansion process and spatial and temporal characteristics of growing cities. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 3(4), 18–32. https://doi.org/10.14246/irpsd.3.4_18

- Erie Sadewo, Ibnu Syabri, & Pradono. (2018). Post-suburbia dan Tantangan Pembangunan di Kawasan Pinggiran Metropolitan: Suatu Tinjauan Literatur. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 115. <https://doi.org/10.22146/mgi.33755>
- Fata Robbany, I., Gharghi, A., & Traub, K.-P. (2019). Land Use Change Detection and Urban Sprawl Monitoring in Metropolitan Area of Jakarta (Jabodetabek) from 2001 to 2015. *KnE Engineering*. <https://doi.org/10.18502/keg.v4i3.5862>
- Firman, T. (2010). Multi local-government under Indonesia's decentralization reform: The case of Kartamantul (The Greater Yogyakarta). *Habitat International*, 34(4), 400–405. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2009.11.005>
- Glaeser, E. L., & Kahn, M. E. (2003). *Sprawl and Urban Growth*. <http://www.nber.org/papers/w9733>
- Hudalah, D., Zufahmi, F., & Firman, T. (2013). Regional Governance in Decentralizing Indonesia. *Urban and Contemporary Asia*.
- Laquian, A. A. (2005). Metropolitan governance reform in Asia. *Public Administration and Development*, 25(4), 307–315. <https://doi.org/10.1002/pad.384>
- Magvirah Andira Selang, Doddy Aditya Iskandar, & Retno Widodo. (2018). Tingkat Perkembangan Urbanisasi Spasial Di Pinggiran KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) Tahun 2012-2016. *Urbanisasi Dan Pengembangan Perkotaan*.
- Mulasari, A., Husodo, H. A., & Muhadjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 96. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3521>
- Phelps, N. A., & Wood, A. M. (2011). The new post-suburban politics? *Urban Studies*, 48(12), 2591–2610. <https://doi.org/10.1177/0042098011411944>
- Pradoto, Wisnu. (2012). *Development patterns and socioeconomic transformation in peri-urban area (Case of Yogyakarta, Indonesia)*. Univ.-Verl. der TU Berlin.
- Priambodo, H. D. P., & Herumurti, W. (2020). Perencanaan Pengembangan Sistem Penyaluran Air Limbah Terpusat IPAL Sewon. *Jurnal Teknik ITS*.
- Rachmawati, R., Rijanta, R., & Djunaedi, A. (2015). Location decentralization due to the use of information and communication technology: empirical evidence from Yogyakarta, Indonesia. *Human Geographies-Journal of Studies and Research in Human Geography*, 9(1). www.humangeographies.org.ro

- Stansel, D. (2005). Local decentralization and local economic growth: A cross-sectional examination of US metropolitan areas. *Journal of Urban Economics*, 57(1), 55–72.
<https://doi.org/10.1016/j.jue.2004.08.002>
- Suwardana Malik, S., Achmad, M., & Sutiyo, S. (2023). Penerapan E-Government Melalui Sistem Pelayanan Daring Administrasi Kependudukan Subang (Sipedas) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 10(2), 704–717.
<https://doi.org/10.47668/edusaintek.v10i2.826>
- Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, T. (2015). Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area. *Habitat International*, 49, 221–229.
<https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.05.024>